



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sipil dalam konteks Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan problematika kesejahteraan sosial. problematika yang terjadi di Negara berkembang seringkali didasari atas dikembangkannya narasi kesejahteraan dengan konsep yang ekonomistik, yakni dengan wujud praktis terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan pemikiran ekonomistik seringkali kawasan-kawasan yang dianggap sebagai lumbung kemiskinan dijadikan sasaran proyek-proyek pembangunan. Disinilah letak argumentasi mengapa investasi pertambangan skala besar dibutuhkan, yakni keberadaan perusahaan besar untuk mengeksploitasi tambang adalah bagian dari proyek pembangunan, bahkan bagian dari skema pengentasan kemiskinan. Narasi-narasi semacam ini bukan fenomena baru. Nyaris dalam bentang sejarah pertambangan di dunia, perilaku pimpinan daerah/Negara selalu menggunakan klaim-klaim semacam itu. Sayangnya, dalam banyak hal, kesejahteraan yang dibayangkan itu justru jauh panggang dari api.

Permasalahan mengenai kesejahteraan dalam konteks kotemporer terlihat masih menjadi isu yang populis di Negara berkembang. Fenomena tersebut dikarenakan kurangnya peran utama Negara dalam tanggung jawabnya untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Kondisi ini terjadi dikarenakan sebagian besar kebijakan publik yang dihasilkan oleh para *Policy Maker* tanpa sadar cenderung berpihak kepada kepentingan modal. Banyak kepentingan rakyat yang dulunya menjadi tanggung jawab Negara kini telah diatur oleh mekanisme Pasar bebas dalam desain demokratisasi yang membangun sistem hubungan



Negara dengan rakyat dalam tatanan masyarakat neoliberalis¹. Dan disinilah gerakan sosial hadir dalam rangka merespon kebijakan neoliberalisme yang pada kenyataannya menghilangkan paham kedaulatan rakyat. Perlawanan rakyat dari berbagai komunitas bergabung dalam sebuah konsep diri gerakan sosial.

Gerakan sosial yang berorientasi pada perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi. salah satunya adalah strategi perlawanan dengan metode memasuki ruang politik, yaitu mempengaruhi proses kebijakan publik. Karena dalam proses kebijakan publik tersebutlah menjadi arena pertarungan antara mereka yang mendukung kapitalisme liberal dengan mereka yang selalu menginginkan keadilan dan kedaulatan rakyat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan Kapitalisme global yang semakin pesat, yang menjadi penyebab dari krisis di banyak Negara belahan dunia. Kemenangan Kapitalisme global tersebut dimulai ketika mereka mengadakan GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*), suatu perjanjian global tentang sistem perdagangan global liberal sejak tahun 1940-an. Yaitu untuk mempengaruhi dan merebut kembali *global governance* dalam bidang ekonomi dan politik perdagangan. Sehingga peran utama Negara dalam pembangunan semakin tergeser oleh kepentingan kapitalis liberal tersebut.

¹ Neoliberalisme bukanlah sebuah produk yang benar-benar baru, tetapi dia adalah sebuah proses revisi terhadap sistem ekonomi sebelumnya tanpa menghilangkan kerja dasar dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi liberal, bahkan sistem ekonomi Keynesian. Sistem ekonomi liberalnya Adam Smith, lalu sistem “penyelamat kapitalisme awal” Keynesian serta yang teranyar yaitu sistem ekonomi neoliberal adalah sama-sama sebuah sistem yang menempatkan sistem produksi yang menempatkan adanya kaum yang mempunyai modal dan kaum yang hanya bekerja di dalam proses produksi. Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Seperti kita ketahui bersama, paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (*Great Depression*) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu. (Fakih, 2002:32)



Masuknya kepentingan Negara dikarenakan perubahan paradigma dari model kapitalisme Negara kepada kapitalisme liberal. Perubahan tersebut membawa dampak bagi banyak Negara terutama bagi Negara-Negara yang ikut menandatangani konvensi WTO (*World Trade Organization*)² (Fakih,2002:64). Kondisi Negara yang ikut serta dalam konvensi memberikan dampak yang besar bagi rakyat yang hidup dalam Negara. Karena sejak tahap inilah yaitu mulai tahun 1940-an awal terjadinya perubahan peran Negara. Perubahan Negara dikarenakan sistem *governance* yang telah dipengaruhi oleh kekuatan kapitalisme global. Kondisi tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat lagi memenuhi tuntutan rakyat secara utuh. Ketidakmampuan Negara dalam memenuhi hajat rakyat dikarenakan, banyak komoditas yang sangat penting bagi rakyat seperti air, hutan, pangan, kesehatan, dan layanan sosial kini telah diambil alih oleh kapitalisme global. Pengambilan tersebut melalui kekuatan TNCs (*Trans National Corporation*) dan MNCs (*Multi National Corporation*).³

Perkembangan kapitalisme saat ini telah melahirkan era neoliberalisme. Berkembangnya era fase ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kapitalisme itu sendiri. Yaitu mulai dari kapitalisme era kolonialisme, kapitalisme

² WTO merupakan Organisasi perdagangan dunia dan merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Tujuan utamanya adalah membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia adalah salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994. (Fakih, 2002:105)

³ Meskipun bisa dikatakan sama-sama sebagai perusahaan internasional, Multinational Corporation (MNC) dan Transnational Corporation (TNC) secara definitif memiliki perbedaan yang mendasar. MNC merupakan perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara tetapi mengelola operasi itu dari basis negara asal. MNC bercirikan sikap etnosentris. Contoh MNC antara lain: Sony, Deutsche Bank, AG, dll. Sedangkan TNC adalah perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan di lebih dari satu negara tetapi mendesentralisasikan manajemen ke negara lokal. TNC bercirikan sikap polisentris. Contoh TNC antara lain: Nestle, Frito Lay, dsb. (Fakih, 2002:120)



Negara pasca kolonialisme sampai kepada kapitalisme era neoliberalisme yang berkembang seperti saat ini. Di setiap tahap perkembangan kapitalisme selalu diikuti oleh perubahan dalam peran Negara. Pada era kapitalisme kolonialisme misalnya, kekuatan kapitalisme kuat dan posisi Negara sangat dipengaruhi. Kemudian, pada era kapitalisme Negara yang sering disebut dengan era *State-led development* maka kekuatan kapitalisme secara global sangat melemah. Karena pada tahap inilah Negara mempunyai peran utama dalam pembangunan (Fakih, 2002:66).

Model ini dulu ditetapkan sebagai alternatif sejak timbulnya krisis liberalism, Yang terjadi pada era kapitalisme kolonialisme dan imperialisme sebelumnya. yaitu pada tahun 1930-an. Sejak era *State-led Development* tersebut, Negara menjadi aktor utama dan diberi wewenang sebagai pengendali ekonomi dan politik. Negara lah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan juga dianggap bertanggung jawab dalam melindungi dan mencegah setiap bentuk pelanggaran HAM. Dan gerakan sosial yang ada pada saat itu lahir dalam rangka merespon model kapitalisme Negara atau *State-led development*. (Faqih,2002: 68)

Berkembangnya gerakan sosial yang didasari atas berkembangnya isu HAM. Memberikan efek dengan munculnya Banyak ornop yang menggunakan hak azasi manusia sebagai perisai untuk menuntut peran Negara. Agar sikap yang diambil Negara sesuai dengan konvensi yang mereka tanda tangani. Akan tetapi, sejak menguatnya ‘kapitalisme Negara’ golongan kapitalisme liberal sangat menderita. Karena akumulasi dan investasi mereka menjadi lamban yang disebabkan oleh banyaknya Negara melakukan kebijakan proteksionis demi melindungi golongan kapitalisme ‘pribumi’ dan GNP Negara, sehingga hal ini



menjadi penghalang utama yang membatasi gerakan dan ekspansi dari golongan kapitalisme transnasional. Maka, sejak terjadinya krisis dalam tubuh kapitalisme liberal, muncul suatu strategi untuk merebut kembali *global governance* dalam bidang ekonomi dan politik. Strategi tersebut berubah dari model kapitalisme Negara atau *state-led development* kepada model kapitalisme persaingan bebas atau liberal. Strategi tersebut berjalan melalui perjanjian GATT yang juga turut melahirkan badan baru yang dikenal dengan WTO (*world trade Organization*). banyaknya Negara-Negara yang menjadi anggota WTO merupakan awal dari kemenangan dan bangkitnya kembali kekuatan kapitalis liberal. Golongan kapitalis liberal sudah mulai memegang kendali ekonomi global, mereka dapat menguasai SDA dari berbagai Negara dan juga melakukan perdagangan bebas (Faqih 2002: 72)

Praktek perdagangan bebas dapat dengan mudah mereka lakukan. karena Negara-Negara yang tergabung dalam WTO dilarang melakukan proteksi ekonomi seperti sebelumnya kepada golongan kapitalis liberal. Karena Negara-Negara yang tergabung dalam WTO harus meratifikasi semua konvensi *trade and tariff*, termasuk perjanjian investasi, hak cipta intelektual dan pertanian. Sehingga dapat diasumsikan bahwa awal dari matinya peran utama Negara sebagai pengendali ekonomi politik Negara adalah ketika mereka tergabung dalam WTO dan harus mengikuti beberapa kesepakatan yang ada didalamnya. Kebijakan publik yang dihasilkan oleh Negara harus disesuaikan dengan konvensi *trade and tariff* yang ada dalam WTO tersebut. Dan kekuasaan Negara untuk mengontrol SDA dan ekonomi telah tergusur oleh paham neoliberalisme melalui diskursus *good governance*. Hal ini disebabkan oleh visi dan idiologi dari WTO tersebut



ternyata bertentangan konvensi PBB yang masih mengindahkan akan keadilan dan kedaulatan rakyat pada era *state-led development*. Dan yang lebih penting lagi saat ini adalah menguatnya paham persaingan bebas atau neoliberalisme dan tenggelamnya paham keadilan sosial dan kerakyatan. Karena berbagai kepentingan dan keadilan rakyat yang sesungguhnya harus direalisasikan oleh Negara melalui kebijakan publik kini telah bergeser ke dalam arena persaingan bebas oleh kekuatan kapitalisme secara global (Frank, 2002:214)

Perkembangan kapitalisme dewasa ini sering juga disebut sebagai kapitalisme di era globalisasi. Karena sesuai dengan prinsip kepentingan kapitalisme yaitu bagaimana menyatukan ekonomi Negara ke dalam ekonomi global seperti yang dicita-citakan oleh TNCs. Sehingga aktifitas ekonomi Negara-Negara terutama yang tergabung dalam WTO harus disesuaikan oleh *grand design* kapitalisme transnasional yaitu oleh kepentingan TNCs. Secara teoritis memang tidak ada perbedaan ideologis antara model kolonialisme liberal dengan neoliberalisme di era globalisasi. Hanya saja, proses globalisasi memiliki mekanisme yang lebih canggih dari kapitalisme sebelumnya. Kapitalisme di era globalisasi dibangun secara global melalui kebijakan Internasional, hingga tingkat Nasional. Tak hanya sebatas itu kebijakan juga dibangun dalam konteks Kabupaten bahkan hingga Pedesaan. Sehingga, mempengaruhi *sistem governance* Negara-Negara. Kondisi tersebut membuat peranan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri mulai tersingkir. Kecuali, jika rakyat melakukan perlawanan melalui gerakan sosial yang terorganisir. Serta sesuai dengan perkembangan kapitalisme di era neoliberalisme saat ini. Gerakan sosial tersebut menjadi respon akan kehidupan rakyat yang kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi oleh Negara



secara penuh. Karena sumber-sumber produksi seperti air, tanah, hutan dan lain sebagainya kini mayoritas dikuasai oleh TNCs.

Fenomena semakin banyaknya sumber-sumber produksi yang dikuasai TNCs. Mempengaruhi banyak kebijakan neoliberalisme yang diterapkan Negara-Negara yang terbagung dalam WTO, salah satunya adalah Indonesia. Banyaknya kebijakan neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia, juga tidak dapat dilepaskan dari banyaknya aktor yang berada di belakang neoliberalisme ataupun globalisasi tersebut. Seperti, TNCs, IFIs (*International Financial Institutions*) yang mempunyai misi utama dalam memberikan pinjaman bagi Negara miskin termasuk Indonesia. Dari sekian banyak IFIs yang terkenal, yang memberikan pinjaman kepada Indonesia adalah *World Bank* dan IMF. Meskipun, Peminjaman modal untuk Indonesia didasari atas Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang melimpah menjadi incaran untuk dieksploitasi. Masuknya Pinjaman ke Indonesia seakan-akan menjadi tanda Berakhirnya kolonialisme bangsa-bangsa yang terjajah. Selanjutnya, memasuki era postkolonialisme. di mana di era postkolonialisme dominasi dan penjajahan tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. (Fakih, 2002:209)

Praktek penjajahan teori dan ideologi di Indonesia dapat dilihat dalam Pelaksanaan *Developmentalisme* semasa Orde Baru. Pelaksanaan kebijakan *Developmentalisme* di era Orde Baru di terjemahkan dengan tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kepatuhan Negara kepada perintah lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, World Bank, WTO, TNC/MNC, Menunjukkan bahwa bangsa ini masih terus dipaksa berpikir dan bertindak diluar kehendaknya (dihegemoni). Kondisi seperti ini didasarkan atas



hubungan antara masyarakat dan Negara dengan internasionalisasi modal yang tidak seimbang bahkan eksploitatif. Kondisi tersebut merupakan hakekat dari penindasan-penjajahan (imperialisme), yang ada semenjak kolonialisme. Pada era Kolonialisme maupun era postkolonialisme memberikan Perubahan paradigma politik agraria⁴

Perubahan politik agraria dalam Pelaksanaan Developmentalisme semasa Orde Baru dapat dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. antara lain, melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di tahun 1967 dan 1968. Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Tindakan yang dilakukan oleh Negara bertujuan untuk membuka kran investasi di Indonesia. Termasuk berinvestasi pada pengelolaan sumber daya Indonesia. Pilihan paradigma pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, karena atas dukungan corak hukum yang pembuatan dan pembentukannya sangat sangat legal formal dan positivistik (Mustain,2007;71). Dengan sejumlah ketentuan-ketentuan hukum yang ada, paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan ditopang oleh investasi modal asing digalakkan secara besar-besaran melalui industrialisasi.

Kebijakan industrialisasi yang dilakukan oleh orde baru secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi yang ditanggung oleh rakyat. Konsekuensi dari kebijakan dapat dilihat semakin banyaknya kebutuhan lahan atau tanah (*yang*

⁴ Pemahaman tentang agraria sebenarnya tidak hanya sebatas pada tanah tetapi meliputi juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas tertentu juga mencakup luar angkasa (Boedi Harsono SH, *Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaan UUPA*, Penerbit Djambatan, 2000 hal 4)



umumnya dikuasai rakyat tanpa tanda kepemilikan sesuai kehendak hukum Negara) cukup besar sebagai tempat untuk investasi.. Untuk itu Negara perlu memberikan jaminan hukum guna memfasilitasi kebutuhan lahan tersebut, yang pada akhirnya memunculkan konflik pertanahan antara rakyat berhadapan dengan Negara yang ditopang oleh perangkatnya, yaitu birokrasi dan keamanan (Mustain,2007;72).

Kebijaksanaan Agraria Negara Orde Baru, kemudian membuahkan masalah agraria. yang mana, masalah tersebut meliputi (Fauzi,2001:11):

- 1) Penggusuran/perampasan tanah rakyat;
- 2) Penggusuran sumber daya alam kepunyaan masyarakat
- 3) Tidak terjamin/terlindunginya hak-hak rakyat atas sumber-sumber daya alam oleh hukum nasional
- 4) Penguasaan hutan dan penambangan yang melanggar hak-hak tradisional rakyat atas sumber-sumber ekonomi, lingkungan hidup fisik dan perpangkalan sosial budaya mereka.
- 5) Penguasaan sumber daya laut, pengrusakan lingkungan laut dan kawasan pantai oleh pemodal dan industri pariwisata.

Keberadaan permasalahan agraria yang ditimbulkan oleh kebijakan Orde Baru menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Karena banyak rakyat yang dirampas haknya akibat dari mega proyek industrialisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Bukti dari perlawanan masyarakat atas kebijakan Orde Baru adalah gerakan sosial Reformasi oleh masyarakat sipil. Dengan adanya Reformasi



yang dilakukan oleh masyarakat. Berbuntut pada lengsernya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto.

Pasca lengsernya Suharto dan berakhirnya era orde baru merubah paradigma kebijakan pembangunan oleh Negara. Akan tetapi, Keijakan neoliberalisme pasca Reformasi bukanlah mengalami pasang surut melainkan semakin berkembang. Salah satu bukti nyata dari kebijakan neoliberalisme adalah privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN merupakan konsep yang dikembangkan oleh IMF tidak semata-mata untuk memperbaiki kinerja perusahaan, melainkan langsung diarahkan untuk mengubah status kepemilikan dari BUMN tersebut menjadi perusahaan swasta. Tujuan akhir dari Privatisasi BUMN adalah praktek produksi tanpa intervensi pemerintah Indonesia (Baswir dalam Wibowo dan Wahono,2002:202).

Dalam konteks Negara Indonesia kondisi tersebut bersifat paradog. dikarenakan berdasarkan kepada penjelasan pasal 33 UUD 1945, secara ormatif sistem ekonomi yang hendak dijalankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 dengan tegas menyatakan

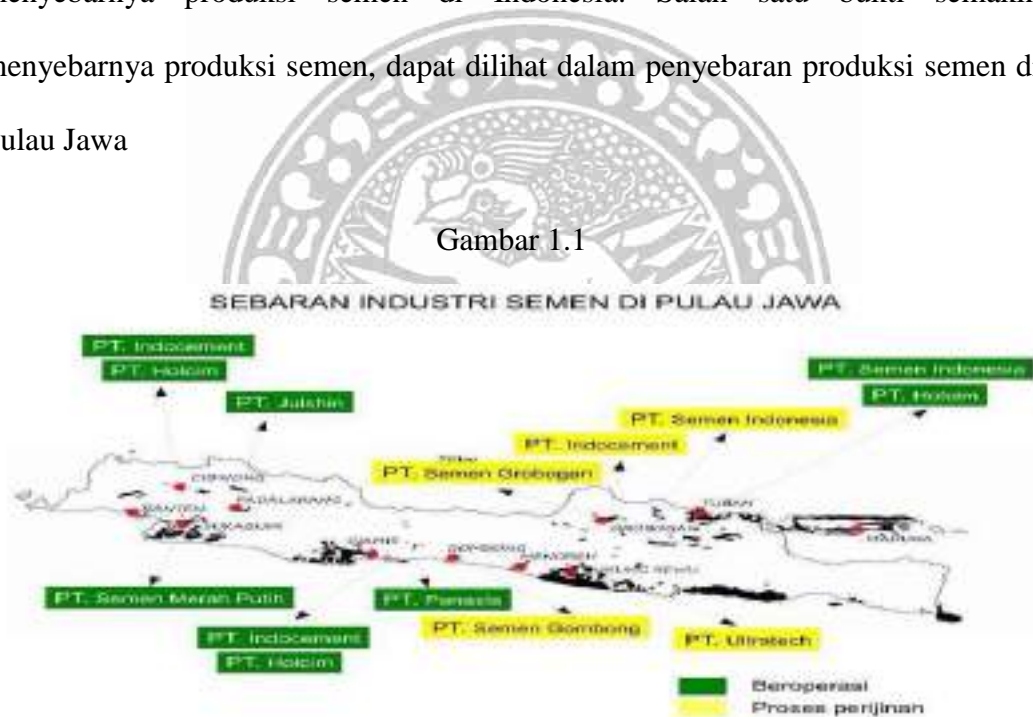
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan segala kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Namun, Regulasi yang tertuang dalam UUD tidak bisa di aplikasikan sesuai dengan kondisi indonesia. Kondisi tersebut dikarenakan keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi membuat beberapa BUMN yang berada dalam posisi kinerja



yang sehat. Sehingga, tidak membutuhkan “*suntikan*” bantuan modal, harus membuka investasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan salah satu poin dalam *Letter of Intent* (LoI), yaitu privatisasi BUMN. Kebijakan ini termasuk BUMN yang mengurus dalam hal eksplorasi dan pengolahan sumber daya alam Indonesia, seperti PTPN II dan Sucfindo (Perkebunan), Pupuk Kaltim (Pupuk), PT. SI (semen Indonesia) atau TBB Bukit Asam (Pertambangan).

Efek Privatisasi BUMN dalam petambangan dapat dilihat dari semakin menyebarnya produksi semen di Indonesia. Salah satu bukti semakin menyebarnya produksi semen, dapat dilihat dalam penyebaran produksi semen di Pulau Jawa



Berkembangnya sebaran industri semen di pulau jawa seakan-akan menjadi bukti terjebaknya Indonesia dalam praktek neoliberalisme yang berorientasi pada globalisasi. Selain itu, Bertambahnya banyaknya luasan konsesi pertambangan, terutama diwilayah karst menjadi layak dipertanyakan karena data dari Asosiasi Semen Indonesia sendiri menunjukkan bahwa produksi semen di

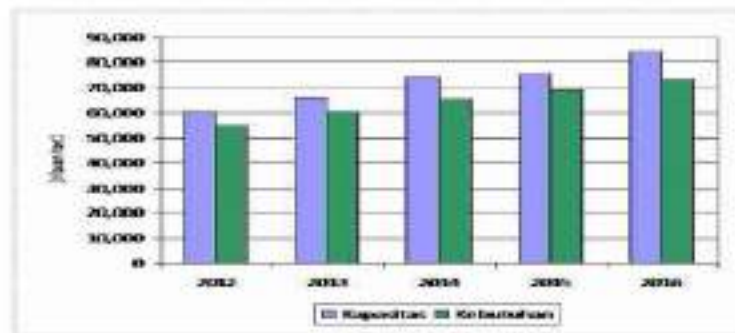


Indonesia selama ini masih mencukupi dan tidak menunjukkan adanya kekurangan yang membutuhkan ekspansi lahan besar-besaran untuk dieksploitasi.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari proyeksi pabrik semen dari tahun 2012-2016. Dalam Proyeksi tersebut mendiskripsikan Indonesia tidak pernah kekurangan dengan kebutuhan semen

Tabel 1.1

TABEL KEBUTUHAN DAN KAPASITAS SEMEN DI INDONESIA



Sumber data : Asosiasi Semen Indonesia

Indonesia tidak pernah mengalami defisit atau kekurangan semen. Kemampuan pabrik semen yang sudah ada mampu memenuhi kebutuhan semen nasional

Kondisi surplus seharusnya memberikan kesadaran industri semen untuk memperhatikan lingkungan. Namun, dengan dalih kebutuhan Nasional produksi pabrik semen tetap saja di “genjot”. Salah satu bukti peningkatan produksi semen adalah rencana pembangunan pabrik semen di area Pegunungan Kendeng Utara. Dalam praktek ini skema pembebasan Pegunungan Kendeng Utara diubah dari kawasan lindung menjadi kawasan industri semen. pembebasan lahan tersebut memperlihatkan ekspansi perusahaan Negara yang mengambil tanah milik rakyat untuk kepentingan modal. Secara praktis praktek tersebut dapat dilihat dengan rencana pembangunan empat pabrik semen di empat Kabupaten yaitu PT.



Sahabat Sakti/ PT. Indocement di Pati, PT Vanda prima Listri di Grobogan, PT. Imasco Tambang Raya di Blora dan PT Semen Indonesia di Rembang

Pembebasan Pegunungan Kendeng didasari atas penelitian yang dilakukan oleh kementerian ESDM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1998. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Perbukitan Gunung watu putih yang berada di desa Tegaldowo, Timbrangan, Pasucen, Kajar dan Kadiwono Di kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, merupakan kawasan khas berupa lapisan gua kering dan berair. Formasi ini terdiri dari batu gamping dolomitan, dengan organisme pembentuknya terutama, ganggang, koral dan foraminifera, yang terbentuk pada lingkungan laut dangkal pada jaman pliosen. Kondisi alam tersebut sangat potensial untuk pembangunan pabrik semen. dengan dasar penelitian tersebut pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2010 mengeluarkan ijin pembangunan pabrik semen diarea Pegunungan watu putih.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Rembang yang mengijinkan kawasan lindung untuk menjadi kawasan industri pabrik semen, seakan bersifat kontradiksi. Kondisi tersebut dikarenakan Pegunungan watu putih merupakan sumber mata air yang dibutuhkan oleh waga. Dengan ditetapkannya sebagai kawasan industri semen seakan membuat kondisi warga semakin gelisah dan takut untuk tidak mendapatkan sumber mata air⁵. Kegelisahan warga semakin memuncak melihat aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan pabrik semen masih saja dilanjutkan (PT. Semen Indonesia Tbk). Ditambah antrian panjang investor pabrik semen yang akan mendirikan pabriknya dan menambang di

⁵ Pegununga watu putih merupakan salah satu dari empat sumber mata air di kabupaten Rembang. Selain pegunungan watu putih juga ada sumber mata air didaerah sumber, kalipang (kecamatan sarang), taban(kecamatan sluke). Sulang (kecamatan sulang) dan juga sumber njape sumber airair di kecamatan lasem.(sumber BPS rembang 2010)



Rembang. Janji DPRD Rembang akan membentuk pansus (Panitia khusus) guna menyelesaikan permasalahan pabrik semen, sampai kini sama sekali tidak ada realisasinya. pemerintah Kabupaten Rembang masih tetap bergeming dan sama sekali tidak mendengarkan suara masyarakat.

Penetapan sebagai kawasan lindungpun tidak membuat investasi pabrik semen di Kabupaten Rembang berhenti. Kondisi tersebut direspon oleh masyarakat yang tergabung dalam jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Respon yang diberikan berupa pernyataan menolak pendirian dan penambangan pabrik semen di Rembang. Pernyataan tersebut beserta tuntutan untuk menghentikan seluruh proses yang berkaitan dengan pembangunan pabrik semen, serta meminta kepada bupati Rembang agar mencabut dukungan dan persetujuannya terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen tersebut. Tak hanya sebatas itu, JMPPK juga meminta pemerintah Kabupaten Rembang meninjau ulang dan konsisten terhadap peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rt/Rw pasal 63. dan peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 pasal 19 tentang Rt/Rw Kabupaten Rembang, bahwa cekungan watuputih adalah merupakan kawasan imbuhan air dan kawasan lindung geologi.

Serta menuntut kepada perhutani supaya tetap menjaga komitmen dalam pelestarian hutan. mendesak kepada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar meninjau ulang rencana pembangunan ini dan konsisten pada misinya seperti yang dikampanyekan pada saat pemilihan :



- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan.
- 2) memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sikap yang diberikan oleh golongan masyarakat yang kontra dengan pembangunan pabrik semen didukung oleh warga sekitar area pembangun pabrik semen. Dukungan tersebut dapat dilihat dari Banyaknya warga anggota JMPPK Rembang di 6 desa yang berada tepat di sekeliling wilayah lokasi rencana pabrik bergerak melakukan juga melakukan penolakan secara massif. sebagai bentuk Penolakan dan protes dengan berbagai cara dilakukan secara terus menerus. Diantaranya adalah pada bulan Maret 2013 mereka mengirimkan surat kepada Presiden, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang hingga Camat Gunem. Tidak berhenti disitu, ratusan warga pada September 2013 juga berunjuk rasa di depan kantor Perhutani KPH Mantingan dan kantor DPRD Rembang. Memasuki awal tahun 2014, warga berencana menggugat PT SI ke meja peradilan. Mereka mengatakan bahwa penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai areal penambangan telah melanggar Perda RTRW Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011. (Muhammad Sobary, [//koran-sindo.com//](http://koran-sindo.com) senin 23 juni 2014. *perjuangan warga Rembang*. Diakses 19/09/2014 pukul 20.00)

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Rembang tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. sesungguhnya bisa didefinisikan sebagai fenomena yang bersifat parallel, atau dapat di diskripsikan dengan kelanjutan dari gerakan masyarakat sipil era Orde Baru atau era Reformasi awal. Argumentasi tersebut



didasarkan atas beberapa karakteristik yang menonjol dari fenomena gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari munculnya pengelompokan-penlompokan masyarakat yang terlibat dalam gerakan social. Keberadaan kelompok tersebut sebagai bentuk lain dari gerakan sosial masyarakat sipil melawan represifitas Negara dan arus modal. Dalam kasus gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Kendeng Utara,. keberadaan JMPPK atau jaringan masuyarakat peduli pegunungan Kendeng merupakan salah satu diskripsi dari gerakan sosial masyarakat sipil.

Fenomena JMPPK sebagai gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara, pada dasarnya bukanlah fenomena yang baru. Meskipun, bukan fenomena yang baru gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara, secara umum mengesankan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sudah terkesan sebagai gerakan yang bersifat intelektual. atau gerakan yang dapat dikatakan sebagai gerakan sosial yang memiliki konsep yang jelas. Konsep gerakan dapat dilihat dari keberadaan lembaga yang mampu mengakomodir dari ketidakaupuasan masyarakat sipil terhadap sistem yang berkembang.

Fenomena gerakan masyarakat Pegunungan Kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. dapat menjadi penjelasan tentang mulai bergesernya pemahaman tentang gerakan sosial yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat sipil. Pada awalnya pemikiran tentang masyarakat sipil didiskripsikan bahwa masyarakat sipil merupakan golongan komunitas yang bersifat statis sparatis, apatis, tidak rasional dan enggan berubah. Dan dengan adanya gerakan sosial masyarakat sipil seakan-akan Pemikiran tersebut dengan sendirinya terbantahkan, dimana salah satu komunitas yang digunakan untuk



mendiskripsikan masyarakat sipil adalah kelompok petani. Kelompok tani bukanlah lagi bersifat seperti golongan yang didiskripsikan oleh pemikiran lama perkembangan saat ini komunitas tani sudah menjadi salah satu kekuatan yang mampu bergerak untuk memperjuangkan kepentingannya

Argumen tentang komunitas petani yang didiskripsikan sebagai masyarakat sipil. didukung dari penelitian yang dilakukan oleh **Sartono Kartodirjo (1984)**, **Suhartono (1995)**, **Anton Lucas (1989)**, **Sugianto Padmo (1975)**. Yang mendiskripsikan tentang gerakan sosial petani di Indonesia. Selain itu, penelitian kontemporer yang dilakukan **Hotman M. Siahaan (1996)** tentang pembangkangan terselubung para petani tebu dalam program TRI, juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang begitu kuat dicap sebagai kelompok yang pasrah, *manut*, *narimo*, ternyata tiba-tiba berubah melakukan protes secara eksplosif menunjukkan siasat yang cerdas untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan secara berani.

Kendati demikian, kajian tentang masyarakat sipil yang didiskripsikan oleh beberapa ahli diatas hanya sebatas menggambarkan gerakan masyarakat sipil atas respon dari kondisi yang dialami. Unsur lain yang tidak didiskripsikan dalam gerakan masyarakat sipil tersebut adalah, Bagaimana perlawanan yang bersifat terorganisir baik melalui akses-akses kelembagaan maupun melalui pembentukan organisasi-organisasi masyarakat sipil independen ataupun melalui *non government organization* (NGO) tidak didiskripsikan dengan detail. Maka setelah kajian-kajian masyarakat sipil tersebut muncul pengembangan tentang kajian-kajian gerakan masyarakat sipil yang mendiskripsikan tentang pembentukan organisasi dalam gerakan sosial masyarakat sipil`



Pengorganisasian masyarakat sipil dalam gerakan sosial dapat didiskripsikan sebagai bentuk strategi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mencapai tujuan dari gerakan. Pada dasarnya, strategi yang dilakukan masyarakat sipil sifatnya masih sederhana sehingga jauh dari gerakan sosial modern. Argumentasi tersebut didasarkan ada aporan **tim bina desa (1999)**. Dimana dalam laporan tersebut mencoba merangkum 8 penelitian lapangan di 8 lokasi kasus-kasus pertanahan. Dalam kajian tersebut terfokus dalam gerakan dan pertumbuhan organisasi masyarakat sipil pada era 80an. Dan salah satu hasil dari rangkuman tersebut mendiskripsikan, Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dikarenakan adanya peran dari tokoh selain masyarakat sipil. Tokoh tersebut ikut dalam pendampingan yang dilakukan dalam gerakan sosial masyarakat sipil. Sehingga, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil semakin menjadi radikal serta memiliki konsep yang jelas tentang orientasi gerakannya.

Namun, penjelasan tentang gerakan sosial masyarakat sipil bukan hanya sebatas tentang kondisi ataupun tentang pengorganisasian masyarakat sipil dalam gerakan sosial. Penjelasan tentang gerakan sosial masyarakat sipil didiskripsikan berbeda oleh **Mustain Mashud** dalam gerakan lereng gunung semeru di era Reformasi. (**Mustain 2007**) dalam diskripsi tersebut menjelaskan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam konteks ini masyarakat didiskripsikan sebagai petani, merupakan bentuk respon dari kondisi yang dialami oleh masyarakat sipil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dalam penelitian ini juga didiskripsikan gerakan masyarakat sipil yang dilakukan pada era Reformasi. konteks gerakan yang dilakukan bukan lagi sebatas pada tindakan yang bersifat sembunyi informal, diam-diam dan selalu merahasiakan. Akan tetapi



model gerakan yang dilakukan lebih bersifat eksplosif, massal bahkan cenderung kearah kekerasan. Dimana keadaan tersebut dikarenakan kondisi politis dari Negara yang tidak mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat represif dalam mengakomodir keadaan yang ada dimasyarakat

Selain itu, kondisi transisional juga membuat aktor memiliki kesempatan dan peluang untuk menyalah gunakan sejumlah potensi nilai-nilai lokal untuk memobilisasi gerakan. Meskipun demikian dalam penelitian ini didiskripsikan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak bisa berhasil seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat sipil dikarenakan adanya pengurus yang tergoda dengan *insentiv-selectif* dari pihak Negara. Pihak Negara dalam penelitian ini di diskripsikan pihak perkebunan. Sehingga, berpindah sikap ke pihak perkebunan bukan lagi berpihak dari masyarakat sipil. Meskipun demikian dalam penelitian tersebut menjelaskan, bahwa peran pemerintah dalam menanggapi gerakan sosial yang berorientasi perlawanan tidaklah sentral. Pihak Negara hanya berperan sebagai pihak yang menjelaskan tentang jalan tengah antara pihak perkebunan dan masyarakat sipil. Sehingga, gerakan masyarakat sipil terkesan dimatikan sedangkan permasalahan tentang agraris tidak lagi ditanggapi, dan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terkesan sia-sia.

. Dari ketiga kajian gerakan sosial masyarakat sipil. didiskripsikan tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dari dimensi gerakan sosial yang bersifat terselubung, hingga gerakan sosial masyarakat sipil yang bersifat terbuka. Dimana dalam kajian gerakan sosial masyarakat sipil juga dijelaskan peran ornop dan problematika yang dialami gerakan sosial. dari kajian-kajian tersebut Memberikan pengertian yang mendalam atas gerakan sosial yang



dilakukan masyarakat sipil dalam respon kondisi yang dialami. Akan tetapi, dalam permasalahan gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen, apakah gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam konteks yang sama dengan pihak yang sama merupakan bentuk improvisasi dari gerakan sosial masyarakat sipil atau kegagalan dari pihak pabrik semen dalam memberikan solusi pada permasalahan ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap imajinasi keberadaan pabrik semen

I.2. Fokus Permasalahan

Studi ini mencoba menelaah orientasi gerakan sosial masyarakat serta ingin menelaah lebih lanjut mengenai strategi dalam gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen dan juga problematika yang dialami dari gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara. Dari uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang?
2. Strategi apa saja yang digunakan oleh gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang?
3. Problematika apa saja yang dialami oleh gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang?



I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1) Tujuan

- 1) Mendiskripsikan Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya gerakan masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang
- 2) Mendiskripsikan strategi apa saja yang digunakan oleh gerakan masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang
- 3) Mendiskripsikan problematika apa saja yang dialami oleh gerakan masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang

I.3.2) Manfaat Penelitian

- 1) Dari aspek teoritik, maupun metodologis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam studi gerakan sosial khususnya khususnya gerakan masyarakat sipil melawan dominasi Negara.
- 2) Secara praktis dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada institusi-institusi pemerintahan dalam aplikasi program pembangunan,

I.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menekankan pada kajaian study kasus. Letak penekanan dalam penelitian ini pada aspek wawancara serta terfokus dalam kehidupan yang dijalani oleh subjek. dalam kasus peelitian adalah inti dari metodoligi humaniora



seperti ini. Webber, sebagai pencetus awal menyebut metode ini sebagai *Eigengetzlichkeit* Atau ilmu sosiologi-humaniora. Maksudnya bahwa setiap lingkup memiliki hukum-hukum kultur realis.

Ilmu Humaniora seperti sosiologi tentunya memiliki perbedaan dengan ilmu alam (*naturewissenschaften*). dimana perbedaan mendasarnya terletak pada posisi subjek terhadap objek dengan cara berpartisipasi dengan objeknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Wilhelm Dilthey (Bertens, 2002:95) dalam ilmu humaniora pergaulan Sehari-harilah kaya akan kompleksitas yang membutuhkan realitas sosial dan historis.

Pengkajian terhadap lingkup tingkah laku subjek dapat bermanfaat dalam analisis interaksi subjek secara simbolik. Penggunaan analogi ilmu-ilmusosial juga diperlukan untuk memudahkan teknis analisa. Sehingga dapat menghasilkan analisis kasus dari gerakan sosial masyarakat melawan pembangunan pabrik semen.

I.4.1) Tipe Penelitian

Bedasarkan uraian metodologi maka tipe dalam penelitian ini adalah *study kasus*. Penggunaan metode *study kasus* sendiri menyangkut dua aspek, yang pertamam mempelajari kasus, dan hasil dari proses tersebut. Kasus sendiri dapat diartikan sebagai sistem penjelasan yang bersifat terbatas. Dimana dalam penelitian ini peneliti hanya mencari apa yang berlaku secara umum dari satu sisi dan keterkaitan dengan partikular dari kasus tersebut, namun dalam hasil akhir penjelasan tersebut mencerminkan diskripsi yang unik dari kasus yang diangkat.



Setelah itu dari apa yang terjadi dari kasus akan diobservasi secara mendalam kemudian diangkat dan interpretasi.

Kasus yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah fenomena gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. Dimana dalam gerakan sosial tersebut dipahami sebagai proses yang mendiskripsikan upaya masyarakat menentang pembangunan pabrik semen. Meskipun tidak mampu menjelaskan secara detail tentang gerakan sosial. Namun, dapat memunculkan identitas karakteristik tertentu mengenai gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam upaya melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang mulai dari kondisi sosial masyarakat yang melatar belakangi terjadinya gerakan sampai pada problematika yang terjadi pada gerakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembanguan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

I.4.2) Teknik Pemilihan Informan

Realitas yang dipahami dalam kasus gerakan sosial masyarakat melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang merupakan fenomena yang bersifat makro. Dalam penenititan ini fenomena tersebut di analisa dengan sudut pandang subjektif. Dalam konteks ilmu sosial analisis sosial yang berkenaan dengan jenis realitas yang diteliti terbagi dalam empat tingkatan, yaitu *makro-objektif*, *makro-subjektif*, *mikro-objektif*, *mikro-subjektif*. Dan dalam penelitian ini jenis realitas yang akan diteliti adalah *makro-subjektif*. Berupa kesadaran atas kondisi sosial serta kelompok yang disadari oleh individu dalam kondisi sosial maupun kelompok tersebut. Dimana unit yang dianalisis dari penelitian ini adalah,



masyarakat yang ikut serta dalam gerakan sosial masyarakat melawan pembangunan pabrik semen.

Unit analisis yang sudah terdiskripsikan dalam konsep makro subjektif menjadi pertimbangan untuk metode yang digunakan dalam pemilihan informan, dalam penelitian ini metode penelitian informan yang digunakan adalah *purposive* dengan kriteria informan sebagai berikut:

- 1) Tokoh gerakan
- 2) Pihak pabrik semen
- 3) Perangkat Desa
- 4) LSM lingkungan
- 5) Pihak Pemerintah
- 6) Tokoh masyarakat
- 7) Warga diluar pihak kontra pabrik semen
- 8) Pihak Ormas Islam
- 9) LBH Semarang
- 10) Akademisi

Kelompok informan di atas tersebut dianggap sudah menjawab dan menjelaskan permasalahan yang diajukan penelitian tentang gerakan sosial masyarakat melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. Sejumlah informan yang di dapatkan, dirasakan memadai untuk mendiskripsikan tentang fenomena perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen. Jumlah tersebut dianggap cukup. Selain itu, dalam pemilihan informan juga digunakan metode *snowballing* (bola salju). Metode tersebut dipilih dikarenakan gambaran detail tentang informan tidak dapat dengan mudah dicari.

Informan yang sudah dikategorikan digunakan untuk mencari informasi mengenai gerakan sosial. Untuk detail dari informan dapat diprofilkan dengan tabel dibawah ini:



Tabel 1.2
Profil Informan

No	Nama	Pekerjaan	Posisi dalam Gerakan	Sikap terhadap pembangunan pabrik	Peranan dalam Gerakan
1	Joko Priyanto	Petani	Tokoh Gerakan	Kontra pabrik semen	Merekam Aksi Gerakan
2	Edo Rahman	LSM	Pendampingan gerakan	Kontra pabrik semen	Pendamping gerakan
3	Tomi Apriando	LSM	Editor blog gerakan	Kontra pabrik semen	Upload aksi gerakan
4	Sukartini	Petani	Tokoh Gerakan	Kontra pabrik semen	Mediator gerakan
5	Supriyanto	Petani	-	Pro pabrik semen	-
6	Ming lukiarti	LSM	Pendamping gerakan	Kontra pabrik semen	Pendamping aksi
7	Iryanto	Perhutani	Perhutani	-	-
8	Sumarsono	Pedagang	Tokoh pihak pro pabrik	Pro pabrik semen	Kordinator pihak pro pabrik semen
9	Didi	Perangkat desa tegal dowo	Mediator pabrik	Pro pabrik semen	Mediator gerakan
10	Heru	Ketua proyek	Pihak pabrik	Pro pabrik semen	Mediator pabrik
11	Sukinah	Petani	Tokoh gerakan	Kontra pabrik semen	Koordinator lapangan
12	Aan Hidayat	Petani	Koordinator	Kontra pabrik semen	Koordinator warga
13	Muhammad Fahmi	LSM	Koordinator aksi solidaritas	Kontra pabrik semen	Koordinasi aksi solidarita Wilayah
14	Amirudin	Perangkat desa timbrangan	Penyokong pihak kontra	Kontra pabrik semen	Merekrut partisipan gerakan
15	Muhtar Nur Halim	Mantan anggota DPRD Rembang	Mediator diskusi ormas	-	Mediator diskusi golongan NU
16	Mbah Manap	Sesepuh samin	Pendukung aksi gerakan	Kontra pabrik semen	Mengkader tokoh gerakan
17	Imdat	Anggota ormas islam	Media diskusi ormas islam	-	informasi tokoh agama
18	Gurinto	Kelompok samin	Pembuat film	Kontra pabrik semen	Membuat film dokumenter
19	Dwi Sucipto	Petani	Koordinasi aksi	Pro pabrik semen	Mengkoordinir warga pro
20	Dwi Joko	Petani	Koordinasi aksi	Pro pabrik semen	Mengkoordinir warga pro
21	Muhnur	Pengacara	Bantuan hukum warga kontra	Kontra pabrik semen	Pengacara Pihak Kontra
22	Heru Hendrayana	Akademisi	Saksi dalam persidangan	Pro pabrik semen	Memaparkan penelitian karst
23	Nor Hasan	Anggota DPRD Rembang	Mengkrosceks AMDAL	Pro pabrik semen	Mengawasi jalanya pabrik



I.4.3) Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam beberapa cara sesuai dengan apa yang disebut oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai triangulasi data yaitu:

- 1) Wawancara Mendalam
- 2) Observasi

Metode utama yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Metode-metode tersebut bersesuaian dengan metodologi yang dipilih wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data dari individu-individu tertentu sebagai informan untuk keperluan berbagai macam informasi. (Keontjoroningrat, 1994; 130). Wawancara merupakan bentuk pembincangan, seni bertanya dan mendengar. Peneliti dalam wawancara ini tidaklah berperangkat netral dalam memandang realitas yang ada. Peneliti lebih dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki, sehingga lebih memandang pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan dengan dua bentuk yakni wawancara terstruktur (wawancara yang dilakukan apabila terdapat perkembangan jawaban dari informasi di luar pertanyaan terstruktur. Namun, tidak terlampaui jauh dari permasalahan yang diteliti). Untuk bentuk yang kedua lebih dekat kepada metode observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan gerakan perlawanan yang tidak dapat diwawancarai. Sehingga dapat menjadi data sekunder yang merupakan data pelengkap bagi penelitian ini. Selanjutnya dari ketiga metode tersebut akan dilakukan krocek analisa yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari analisa.



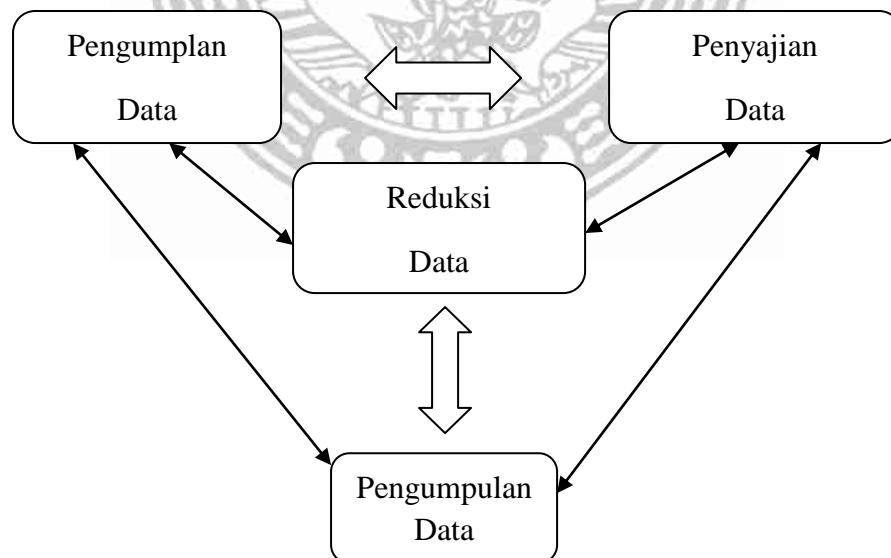
I.4.4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan fokus rangkaian secara deskriptif. Data-data yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian diolah dan di seleksi lalu dianalisis dengan berpedoman pada kerangka teoritik yang telah disajikan. Data-data yang diseleksi dan disusun Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam proses ini dilakukan dengan dua cara pertama adalah membuat pemetaan guna mencari persamaan dan perbedaan klarifikasi atau variasi yang muncul dari data yang tersedia. Cara yang kedua adalah proses menghubungkan hasil dengan teori.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Skema 1.1

TEKNIK ANALISI DATA



Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis data kualitatif, UI Press, Jakarta hlm 20

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar



yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. alur kedua adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang merupakan kegiatan analisis yang ketiga. Selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

I.4.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan subjek penelitian, metode analisis data dan terakhir sistematika penelitian
2. Pada BAB II akan diuraikan elaborasi teori gerakan sosial baru yang didalamnya mencakup sturktural sterin, teori mobilisasi sumberdaya, teori orientasi identitas. Dan terakhir teori *insentiv selectiv*, setelah itu dijelaskan mengenai keangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis fenomena
3. BAB III dalam bagian ini akan diuraikan Kabupaten Rembang dalam pembangunan pabrik semen. dalam penjelasan tersebut meliputi profil Kabupaten Rembang, rasionalisasi pabrik semen, beserta kontroversi yang menyelimuti dan profil pabrik semen.



4. BAB IV Meletusnya perlawanan pembangunan pabrik semen dimana didalamnya terdapat pemaparan data yang di kelompokkan berdasarkan kondisi sosial masyarakat *pra-reclaming*, *recalaming* dan *pasca reclaming*
5. BAB V Gerakan Sosial Pegunungan Kendeng Utara. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi sosial yang melatar belakangi gerakan, kemudian bagaiman strategi dan problematika dari gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng melawan pembangunan pabrik semen. dalam menjelaskan fenomena tersebut disertai dengan analisa teoritik gerakan sosial.
6. BAB VI yang berisi penutup, kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada bagian ini secara singkat akan dikemukakan beberapa kesimpulan pokok yang meliputi kesimpulan teoritis (sosiologis) dan dan praktis (kebijakan). Akan disampaikan pula beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dikembangkan berkaitan dengan kajian gerakan sosial masyarakat sipil.